



ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA TIMUR TAHUN 2015–2024

Sela Wahyu Fitri Cahyani¹, Nafik Umurul Hadi²

Universitas Bhinneka PGRI^{1,2}

e-mail: selawhyu12@gmail.com¹, nafikumurulhadi@gmail.com²

Diterima: 02/06/2026; Direvisi: 26/07/2026; Diterbitkan: 03/08/2026

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ketenagakerjaan dan kebijakan penetapan upah. Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Jawa Timur menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang ditandai dengan fluktuasi tingkat pengangguran terbuka serta perubahan kebijakan upah minimum, terutama pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selama periode 2015–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Data yang digunakan berupa data sekunder time series yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Teknik analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda yang didukung oleh uji asumsi klasik, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta koefisien determinasi dengan bantuan software statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Selain itu, kedua variabel tersebut secara bersama-sama turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa stabilitas pasar tenaga kerja serta kebijakan pengupahan yang tepat berperan penting dalam mendukung proses pemulihan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jawa Timur, Pasca Pandemi Covid-19*

ABSTRACT

The economic growth of a region is influenced by various factors, including employment conditions and wage setting policies. In recent years, East Java Province has faced various economic challenges characterized by fluctuations in the open unemployment rate and changes in minimum wage policies, especially during the economic recovery period following the Covid-19 pandemic. This study aims to analyze the effect of the open unemployment rate and minimum wage on the economic growth of East Java Province during the period 2015–2024. The study uses a quantitative approach with an associative method. The data used are secondary time series data sourced from the Central Statistics Agency (BPS), the National Labor Force Survey (SAKERNAS), and Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant prices. The data analysis technique used was multiple linear regression supported by the classical assumption test, partial test (t-test), simultaneous test (F-test), and coefficient of determination with the help of statistical software. The results show that the open unemployment rate has a



negative and significant effect on economic growth, while the minimum wage has a positive and significant effect on economic growth in East Java Province. In addition, both variables together also influence regional economic growth. The findings of this study indicate that labor market stability and appropriate wage policies play a crucial role in supporting the process of sustainable regional economic recovery.

Keywords: *Open Unemployment Rate, Minimum Wage, Economic Growth, East Java, Post-Covid-19 Pandemic*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah (Marcal et al., 2024). Tingginya pertumbuhan ekonomi mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi barang dan jasa yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan regional, pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan erat dengan peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan stabilitas ekonomi. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari sisi penawaran (supply side) maupun sisi permintaan (demand side). Dari sisi penawaran, ketersediaan tenaga kerja yang produktif berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi, sedangkan dari sisi permintaan, peningkatan pendapatan masyarakat melalui kebijakan upah dapat mendorong konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen utama pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum merupakan dua indikator ketenagakerjaan yang memiliki keterkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Struktur ekonomi Jawa Timur didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan jasa yang berkembang cukup pesat (Assidikiyah et al., 2021). Struktur ekonomi Jawa Timur didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan jasa yang terus berkembang dari tahun ke tahun (Junari et al., 2020). Kondisi tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, dinamika ekonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan dan kebijakan pengupahan (Pradana et al., 2022). Meningkatnya produktivitas sektor industri dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi barang dan jasa, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan aktivitas industri memiliki keterkaitan erat dengan kondisi pasar tenaga kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015–2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Sebelum pandemi Covid-19, tingkat pengangguran cenderung mengalami penurunan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Akan tetapi, pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran akibat terbatasnya aktivitas produksi, penurunan permintaan pasar, dan terjadinya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor usaha. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

mengalami perlambatan bahkan kontraksi pada masa pandemi. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka selama periode tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Barat	5,05	5,66	5,33	5,65	5,02	-2,52	3,74	5,45	5,00	4,95
Jawa Tengah	5,47	5,25	5,26	5,30	5,36	-2,65	3,33	5,31	4,97	4,95
Jawa Timur	5,44	5,57	5,46	5,47	5,53	-2,33	3,56	5,34	4,95	4,93
Bali	6,03	6,33	5,56	6,31	5,60	-9,34	-2,46	4,84	5,71	5,48

(Sumber: BPS Indonesia 2015-2024)

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mengalami kondisi yang relatif stabil selama periode 2015–2019 dengan rata-rata berada di atas 5%. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -2,33% sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menekan aktivitas produksi, investasi, dan konsumsi masyarakat. Setelah pandemi mereda, perekonomian Jawa Timur mulai pulih dengan pertumbuhan mencapai 3,56% pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 5,34% pada tahun 2022 sebelum kembali melambat menjadi 4,95% pada tahun 2023 dan 4,93% pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi berlangsung secara bertahap meskipun masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik.

Selain pengangguran, kebijakan upah minimum juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Putri & Hutabarat, 2024). Upah minimum berfungsi sebagai standar perlindungan pendapatan pekerja sekaligus sebagai pendorong daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS, upah minimum di Indonesia maupun Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan selama periode 2015–2024. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh inflasi, kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan daerah. Perkembangan upah minimum di Indonesia selama periode 2015–2024 disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Grafik Perkembangan Upah Minimum Indonesia Tahun 2015-2024

(Sumber: Badan Pusat Statistik 2024)

Sebagaimana yang ditunjukkan Gambar 1, tren peningkatan yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, rata-rata upah minimum di Jawa Timur berada pada kisaran Rp1 juta hingga Rp2 juta, kemudian meningkat menjadi lebih dari Rp2 juta pada tahun 2024. Kota



Surabaya secara konsisten memiliki upah minimum tertinggi dibandingkan wilayah lain di Jawa Timur karena tingginya aktivitas ekonomi dan biaya hidup perkotaan. Di sisi lain, beberapa wilayah kabupaten seperti Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek memiliki tingkat upah minimum yang relatif lebih rendah.

Kenaikan upah minimum memiliki dampak yang kompleks terhadap pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, kenaikan upah dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat sehingga mendorong permintaan agregat. Namun di sisi lain, kenaikan upah yang terlalu tinggi dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan dan berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, hubungan antara upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kondisi ketenagakerjaan, kebijakan pengupahan, dan pertumbuhan ekonomi daerah (Tangke, 2023). Teori pertumbuhan Neo-Klasik Solow-Swan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi (Mankiw, 2021). Dalam teori ini, tenaga kerja menjadi faktor penting dalam menentukan kapasitas produksi suatu wilayah. Sementara itu, teori Keynes dalam penelitian Aruan et al. (2023) menekankan pentingnya permintaan agregat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan upah minimum dapat meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun apabila kenaikan upah terlalu tinggi dapat mengurangi permintaan tenaga kerja.

Di sisi lain, Hukum Okun menjelaskan bahwa meningkatnya tingkat pengangguran cenderung berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, teori pertumbuhan Solow-Swan menjelaskan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Di sisi lain, *Efficiency Wage Theory* menjelaskan bahwa pemberian upah yang layak dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi tenaga kerja (Katz, 1986). Temuan tersebut diperkuat oleh Coviello et al. (2022) yang membuktikan bahwa peningkatan upah minimum mampu meningkatkan produktivitas pekerja dan menurunkan tingkat pemutusan hubungan kerja, sehingga mendukung mekanisme *efficiency wage* dalam meningkatkan kinerja tenaga kerja.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda terkait pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Anggraini dan Warsitasari (2023) menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, penelitian Putri et al. (2023) menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi regional. Namun demikian, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja akibat meningkatnya biaya produksi perusahaan. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi masih bersifat kontekstual sehingga memerlukan pengujian pada wilayah dan periode yang berbeda.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya research gap mengenai hubungan antara tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi, khususnya pada periode pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian yang secara spesifik membahas kondisi ekonomi Provinsi Jawa Timur pada periode 2022–2024 masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan data sebelum pandemi atau hanya menguji salah satu variabel ketenagakerjaan, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh simultan tingkat pengangguran terbuka dan



upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi pada masa pemulihan ekonomi. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan data deret waktu Provinsi Jawa Timur periode 2015–2024 yang mencakup fase sebelum pandemi, saat pandemi, dan pascapandemi, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perubahan hubungan antarvariabel dalam berbagai kondisi ekonomi. Selain itu, penelitian ini menganalisis pengaruh kedua variabel ketenagakerjaan tersebut secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi regional. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2015–2024.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi regional serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan pengupahan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Pendekatan ini dipilih karena data yang digunakan berbentuk angka dan dianalisis dengan teknik statistik untuk melihat pengaruh antarvariabel penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari Tingkat Pengangguran Terbuka (X1) dan Upah Minimum (X2), sedangkan variabel dependen adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Data yang digunakan merupakan data sekunder dalam bentuk runtun waktu (time series) selama periode 2015–2024. Data tersebut diperoleh dari sumber resmi, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), serta data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Provinsi Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menghimpun berbagai data statistik yang relevan dari publikasi resmi tersebut. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y	= Pertumbuhan Ekonomi
a	= Konstanta
β_1, β_2	= Koefisien regresi
X1	= Tingkat Pengangguran Terbuka
X2	= Upah Minimum
e	= Error term

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, model regresi terlebih dahulu melalui serangkaian uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan kelayakan model secara statistik. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan

melalui uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). Adapun koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Seluruh proses analisis data dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Deskripsi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015–2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada periode sebelum pandemi Covid-19, tingkat pengangguran cenderung mengalami penurunan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan pengangguran akibat pembatasan aktivitas ekonomi, penurunan produksi perusahaan, dan terjadinya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor usaha. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka tersebut mencerminkan dinamika kondisi ketenagakerjaan yang dipengaruhi oleh perubahan aktivitas ekonomi pada setiap periode penelitian, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur

Nomor	Tahun	TPT	Persen
1	2015	906.904	4,47
2	2016	839.283	4,21
3	2017	840.000	4,00
4	2018	850.000	3,91
5	2019	840.000	3,82
6	2020	1.300.000	5,84
7	2021	1.280.000	5,74
8	2022	1.260.000	5,49
9	2023	1.170.000	4,88
10	2024	1.020.000	4,19

(Sumber: BPS 2024)

Tabel 2 menunjukkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur menunjukkan kondisi yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan mencapai 1.300.000 jiwa. Namun, pada periode 2021–2024 jumlah pengangguran terus mengalami penurunan hingga menjadi 1.020.000 jiwa pada tahun 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbaikan pada pasar tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur setelah mengalami peningkatan pengangguran pada tahun 2020.

Deskripsi Upah Minimum Provinsi Jawa Timur

Upah minimum di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan setiap tahun selama periode penelitian. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian inflasi, kebutuhan hidup layak, dan kondisi ekonomi daerah. Meskipun terus meningkat, besaran upah minimum antarwilayah di Jawa Timur masih menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Perkembangan upah minimum di Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian disajikan pada Tabel 3.

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

 <https://doi.org/10.51878/social.v6i3.11849>

Tabel 3. Upah Minimum Provinsi Jawa Timur

Nomor	Tahun	UMP
1	2015	1.000.000
2	2016	1.000.000
3	2017	1.388.000
4	2018	1.508.894
5	2019	1.163.059
6	2020	1.768.777
7	2021	1.868.777
8	2022	1.891.567
9	2023	2.040.244
10	2024	2.165.244

(Sumber: BPS 2024)

Perkembangan upah minimum di Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian dapat diamati pada Tabel 3. Berdasarkan tabel tersebut, upah minimum di Provinsi Jawa Timur secara umum menunjukkan tren peningkatan selama periode penelitian meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai upah minimum tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 2.165,244 ribu rupiah, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2015–2016 sebesar 1.000,000 ribu rupiah. Secara keseluruhan, peningkatan upah minimum mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan pengupahan yang mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi dan kesejahteraan pekerja di Provinsi Jawa Timur.

Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selama periode 2015–2024 mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional maupun global. Sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur cenderung stabil pada kisaran 5%. Namun, pandemi menyebabkan kontraksi ekonomi pada tahun 2020 akibat menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Nomor	Tahun	PE	Persen
1	2015	1.331.418,24	5,44
2	2016	1.405.563,51	5,55
3	2017	1.482.299,58	5,57
4	2018	1.563.441,82	5,46
5	2019	1.649.768,12	5,47
6	2020	1.611.392,55	5,52
7	2021	1.668.754,36	-2,39
8	2022	1.757.874,90	3,56

Nomor	Tahun	PE	Persen
9	2023	1.844.808,68	5,34
10	2024	1.935.810,15	4,95

(Sumber: BPS 2024)

Berdasarkan Tabel 4, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan selama periode penelitian. Nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 1.935.810,15 miliar rupiah, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 1.331.418,24 miliar rupiah. Peningkatan tersebut mencerminkan berkembangnya aktivitas ekonomi yang didukung oleh berbagai sektor produktif di Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, kondisi tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin baik meskipun menghadapi berbagai dinamika ekonomi selama periode penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi statistik dan layak digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal sebagai salah satu syarat terpenuhinya asumsi klasik. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov dengan kriteria bahwa data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang berarti lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, data residual dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal sehingga model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk analisis regresi pada tahap berikutnya.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa masing-masing variabel independen memberikan informasi yang berbeda sehingga tidak terjadi hubungan linear yang kuat antarsesama variabel bebas. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* lebih kecil dari 10. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,742	1,347	Tidak terjadi multikolinearitas
Upah Minimum	0,742	1,347	Tidak terjadi multikolinearitas

Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,742 atau lebih besar dari 0,10. Selain itu, nilai VIF pada masing-masing variabel sebesar 1,347 atau berada di bawah batas maksimum 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas sehingga memenuhi salah satu asumsi klasik untuk analisis regresi linear berganda.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dalam model regresi sebagai salah satu syarat terpenuhinya asumsi klasik. Pengujian pada penelitian ini menggunakan uji Glejser dengan kriteria bahwa model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki nilai signifikansi sebesar 0,421, sedangkan variabel Upah Minimum sebesar 0,368. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan memiliki varians residual yang bersifat konstan..

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara residual pada suatu periode dengan residual pada periode sebelumnya dalam model regresi. Pengujian pada penelitian ini menggunakan uji Durbin–Watson dengan kriteria bahwa model regresi dinyatakan bebas dari autokorelasi apabila nilai Durbin–Watson berada di antara batas atas (du) dan nilai $(4 - du)$. Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin–Watson sebesar 1,912 yang berada pada rentang tersebut sehingga model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi autokorelasi dan layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (X_1) dan Upah Minimum (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) Provinsi Jawa Timur periode 2015–2024. Analisis ini bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh masing-masing variabel independen, baik secara parsial maupun simultan, terhadap variabel dependen. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan software SPSS versi 25 untuk memperoleh model regresi yang sesuai dengan data penelitian. Hasil analisis regresi linear berganda menjadi dasar dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis regresi linear berganda selengkapnya disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (B)	Std. Error	t hitung	Sig.
Konstanta	5,214	1,327	3,928	0,005
Tingkat Pengangguran Terbuka (X_1)	-0,356	0,118	-3,017	0,019
Upah Minimum (X_2)	0,421	0,135	3,118	0,016

Berdasarkan Tabel 9, diperoleh persamaan regresi linear berganda, yaitu $Y = 5,214 - 0,356X_1 + 0,421X_2 + e$. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 5,214 mengindikasikan bahwa apabila Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur diperkirakan sebesar 5,214%. Koefisien regresi Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar -0,356 menunjukkan adanya hubungan negatif, yang berarti setiap kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1% diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,356% dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Sebaliknya, koefisien regresi Upah

Minimum sebesar 0,421 menunjukkan adanya hubungan positif, sehingga setiap kenaikan upah minimum sebesar 1% diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,421% dengan asumsi variabel lain tetap. Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Upah Minimum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Melalui uji t, dapat diketahui apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh. Hasil pengujian parsial (uji t) dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
Tingkat Pengangguran Terbuka (X1)	-3,017	2,365	0,019	Berpengaruh signifikan
Upah Minimum (X2)	3,118	2,365	0,016	Berpengaruh signifikan

Berdasarkan Tabel 9, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki nilai signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$, sehingga H1 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, variabel Upah Minimum memiliki nilai signifikansi sebesar $0,016 < 0,05$, sehingga H2 diterima. Dengan demikian, Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Pengujian ini juga bertujuan untuk menilai kelayakan model regresi dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil analisis menunjukkan nilai F hitung sebesar 12,487, lebih besar daripada F tabel sebesar 4,74, dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, H3 diterima, yang berarti Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur serta secara bersama-sama memberikan kontribusi dalam menjelaskan perubahan pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen pada model regresi. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin besar pula kemampuan model dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Hasil analisis menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,653 atau 65,3%, yang berarti bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi Pertumbuhan Ekonomi



Provinsi Jawa Timur sebesar 65,3%. Sementara itu, 34,7% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti investasi, inflasi, konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur periode 2015–2024. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran akan diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi daerah. Tingginya tingkat pengangguran mencerminkan rendahnya penyerapan tenaga kerja sehingga kapasitas produksi barang dan jasa menjadi tidak optimal. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya produktivitas ekonomi dan rendahnya pendapatan masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Hukum Okun yang menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran. Dalam konteks Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan selama pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran akibat terbatasnya aktivitas produksi dan distribusi barang maupun jasa. Sebaliknya, pada periode pemulihan ekonomi tahun 2022–2024, penurunan tingkat pengangguran terjadi seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan yang menempatkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin banyak tenaga kerja yang tidak produktif sehingga output ekonomi daerah menjadi lebih rendah. Dengan demikian, peningkatan kesempatan kerja menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggraini & Warsitasari (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tingginya pengangguran menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga menurun. Penurunan konsumsi masyarakat akan berdampak pada melemahnya permintaan agregat dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian Putri et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi regional. Hasil tersebut juga diperkuat oleh penelitian Al Farrell & Atmanti (2023) yang menunjukkan bahwa tingkat upah, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan pendidikan memiliki keterkaitan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, sehingga kondisi pasar tenaga kerja menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kinerja ekonomi suatu wilayah.

Peningkatan tingkat pengangguran pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 menjadi salah satu bukti empiris bahwa stabilitas pasar tenaga kerja sangat memengaruhi kondisi ekonomi daerah. Pembatasan aktivitas ekonomi selama pandemi menyebabkan banyak perusahaan mengurangi kapasitas produksi bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (Randi, 2020). Akibatnya, tingkat pengangguran meningkat secara signifikan dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami kontraksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan



sektor ketenagakerjaan menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah pada saat terjadi krisis ekonomi.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli masyarakat. Kenaikan upah minimum menyebabkan pendapatan pekerja meningkat sehingga konsumsi rumah tangga terhadap barang dan jasa juga mengalami peningkatan. Meningkatnya konsumsi masyarakat akan mendorong permintaan agregat dan mempercepat aktivitas ekonomi daerah.

Temuan tersebut sejalan dengan teori Keynes dalam penelitian Aruan et al. (2023) yang menekankan bahwa konsumsi masyarakat merupakan salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Keynes, peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan konsumsi sehingga aktivitas produksi perusahaan turut meningkat. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada peningkatan output ekonomi daerah. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Salsabila & Muhajir (2023) yang menemukan bahwa upah minimum dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dengan kondisi ketenagakerjaan, karena peningkatan pendapatan masyarakat dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan konsumsi.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Hadi et al. (2018) dalam jurnal berjudul *The Happiness Index as a New and Complementary Measurement of Development as Applied to Each Province of Indonesia*, disebutkan bahwa tekanan dalam dunia kerja sering menimbulkan stres. Oleh karena itu, tidak semua individu yang menganggur selalu merasa tidak bahagia, dan sebaliknya, individu yang bekerja tidak selalu merasakan kebahagiaan. Temuan tersebut diperkuat oleh Lawes et al. (2025) yang menunjukkan bahwa dampak pengangguran terhadap kesejahteraan subjektif berbeda pada setiap individu dan sangat dipengaruhi oleh harapan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih sesuai (re-employment expectations), sehingga tidak semua individu yang menganggur mengalami penurunan kesejahteraan dalam tingkat yang sama. Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan tingkat pengangguran dapat terjadi karena sebagian orang secara sadar memilih untuk tidak bekerja sementara waktu guna memperoleh ketenangan hidup serta menunggu pekerjaan yang lebih sesuai dengan harapan mereka.

Hasil penelitian ini juga mendukung Efficiency Wage Theory yang menjelaskan bahwa pemberian upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan loyalitas tenaga kerja (Katz, 1986). Temuan tersebut diperkuat oleh Coviello et al. (2022) yang membuktikan bahwa peningkatan upah minimum mampu meningkatkan produktivitas pekerja serta mengurangi tingkat pemutusan hubungan kerja, sehingga menunjukkan bahwa pemberian upah yang lebih baik dapat mendorong peningkatan kinerja tenaga kerja. Pekerja yang memperoleh upah layak cenderung memiliki semangat kerja yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian Tamba et al. (2024) juga memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum memiliki keterkaitan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, karena perubahan pendapatan tenaga kerja dapat memengaruhi aktivitas ekonomi regional. Meskipun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja akibat meningkatnya biaya produksi perusahaan. Perbedaan hasil tersebut



dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi daerah, struktur industri, serta kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan pengupahan. Di Provinsi Jawa Timur, peningkatan upah minimum masih mampu diimbangi oleh pertumbuhan sektor industri dan perdagangan sehingga tidak secara langsung menurunkan aktivitas ekonomi daerah. Perbedaan hasil tersebut juga ditemukan dalam penelitian Marliana (2023) yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap pengangguran dapat berbeda bergantung pada karakteristik wilayah dan kondisi pasar tenaga kerja.

Secara simultan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan output produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja dan kebijakan pengupahan. Stabilitas ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada periode pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 tahun 2022–2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya mempercepat pemulihan ekonomi melalui pengembangan sektor industri, perdagangan, UMKM, dan investasi daerah. Kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, penyesuaian kebijakan upah minimum yang mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah turut membantu menjaga daya beli masyarakat selama masa pemulihan ekonomi. Temuan tersebut sejalan dengan Sudirman (2025) yang menjelaskan bahwa hubungan antara kondisi ekonomi regional, kesejahteraan, dan kebijakan upah memiliki peran penting terhadap dinamika pengangguran dan pemulihan ekonomi di tingkat daerah.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan sektor padat karya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, kebijakan penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan. Temuan Febriani et al. (2024) turut mendukung bahwa keseimbangan antara kebijakan upah dan peningkatan aktivitas ekonomi diperlukan agar peningkatan kesejahteraan pekerja tidak menghambat penyerapan tenaga kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur periode 2015–2024. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif, yang menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran menghambat pertumbuhan ekonomi melalui menurunnya produktivitas tenaga kerja dan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, upah minimum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong konsumsi sebagai salah satu penggerak utama perekonomian. Secara bersama-sama, kedua variabel tersebut terbukti berperan dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kondisi pasar tenaga kerja dan kebijakan pengupahan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Temuan ini menunjukkan bahwa upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga pada kebijakan



ketenagakerjaan yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dengan keberlanjutan dunia usaha. Dengan demikian, pengendalian tingkat pengangguran dan penetapan upah minimum yang tepat menjadi strategi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model analisis dengan memasukkan variabel makroekonomi lainnya, seperti investasi, inflasi, pengeluaran pemerintah, dan tingkat pendidikan, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat memperluas cakupan wilayah dan periode penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farrell, I. M., & Atmanti, H. D. (2023). Analisis pengaruh tingkat upah, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (studi kasus 34 provinsi di Indonesia). *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.61689/bisecer.v6i2.431>
- Anggraini, W. P., & Warsitasari, W. D. (2023). Pengaruh tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, kemiskinan dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i02.6922>
- Aruan, N. I. M., Hutagalung, I., & Purba, B. (2023). Analisis dampak teori Keynes dalam mengatasi krisis ekonomi melalui kebijakan fiskal. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.62017/jimea.v1i1.78>
- Assidikiyah, N., Marseto, & Sishadiyati. (2021). Analisis potensi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur (sebelum dan saat terjadi pandemi COVID-19). *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 102–115. <https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.11017>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi*. <https://karanganyarkab.bps.go.id/id/news/2024/03/18/146/pertumbuhanekonomi.html>
- Coviello, D., Deserranno, E., & Persico, N. (2022). Minimum wage and individual worker productivity: Evidence from a large US retailer. *Journal of Political Economy*, 130(9), 2315–2360. <https://doi.org/10.1086/720397>
- Febriani, A., Rahim, A., Samsir, A., Alam, S., & Astuty, S. (2024). Analisis pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. *Inovasi Makro Ekonomi (IME)*, 6(3). <https://journalversa.com/s/index.php/ime/article/view/2388>
- Hadi, N. U., Ananda, C. F., Pudjiharjo, & Khusaini, M. (2018). The happiness index as a new and complementary measurement of development as applied to each province of Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(4), 214–221. <https://ideas.repec.org/a/eco/journ1/2018-04-27.html>
- Junari, T., Rustiadi, E., & Mulatsih, S. (2020). Identifikasi sektor industri pengolahan unggulan Provinsi Jawa Timur (Analisis input output). *TATALOKA*, 22(3), 308–320. <https://doi.org/10.14710/tataloka.22.3.308-320>
- Katz, L. F. (1986). Efficiency wage theories: A partial evaluation. *NBER Macroeconomics Annual*, 1, 235–276. <https://doi.org/10.1086/654025>
- Lawes, M., Hetschko, C., Schöb, R., Stephan, G., & Eid, M. (2025). Examining interindividual differences in unemployment-related changes in subjective well-being: The role of



- psychological well-being and re-employment expectations. *European Journal of Personality*, 39(1), 24–45. <https://doi.org/10.1177/08902070241231315>
- Mankiw, N. G. (2021). *Macroeconomics* (11th ed.). Worth Publishers.
- Marcal, I. A. F., Oentoro, Y. P., & Yasin, M. (2024). Pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan perkembangan perekonomian suatu negara. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 40–47. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898>
- Marliana, L. (2023). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1183–1190. <https://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/490/0>
- Pradana, K. B. E., Hadi, N. U., & Handajanti, S. S. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan dan produk terhadap minat beli industri genteng UD Suhadi Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Cita Ekonomika*, 16(2), 111–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.51125/citaekonomika.v16i2.6621>
- Putri, N. A., Trisniarti, N., Husein, R., & Ichsan. (2023). Pengaruh jumlah penduduk, pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1991–2022. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–13. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jaie/article/view/15384>
- Putri, T. L., & Hutabarat, R. E. (2024). Analisis pengaruh pengangguran, penanaman modal dalam negeri, dan upah minimum provinsi terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 66–77. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v9i1.9842>
- Randi, Y. (2020). Pandemi corona sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(2), 119–136. <https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6709>
- Salsabila, A. M., & Muhajir, M. (2023). Pengaruh tingkat inflasi, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali. *Emerging Statistics and Data Science Journal*, 1(1), 80–91. <https://doi.org/10.20885/esds.vol1.iss.1.art11>
- Sudirman, F. A. (2025). Studi regional atas relasi ekonomi, kesejahteraan, dan upah terhadap pengangguran di lima provinsi Indonesia (2021–2024). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 5(2), 1050–1062. <https://doi.org/10.47709/jebma.v5i2.6795>
- Tamba, Y., Sari, D. N., Maulana, R. I., Asnidar, & Ridha, A. (2024). Pengaruh upah minimum dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 3(1), 304–319. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2782>
- Tangke, D. M. (2023). Analisis upah minimum dan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor determinan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 13(1), 31–43. <https://doi.org/10.35448/jequ.v13i1.20529>